
**IMPLEMENTASI PROGRAM PENERIMAAN BANTUAN SEMBAKO
DI DESA GENTAWANGI KECAMATAN JATILAWANG
KABUPATEN BANYUMAS****¹Apriani Respitansih ²Suryoto**¹Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wijayakusuma Purwokerto
respitansihapriani@gmail.com ²suryotofisip@gmail.com

ABSTRACT

The formulation of the problem proposed is: How to Implement the Basic Food Assistance Receipt Program in Gentawangi Village, Jatilawang District, Banyumas Regency. The aim of this research is to find out how the Basic Food Assistance Receipt Program is implemented in Gentawangi Village, Jatilawang District, Banyumas Regency. The data analysis technique used in this research is descriptive qualitative analysis with an interactive model. The method for determining informants used the Purposive Sampling technique, with the informants being employees of the Basic Food Assistance Implementing Cadre (1 person), the Head of the Service Section (1 person), and the community receiving basic food assistance in Gentawangi Village (5 people), a total of 7 informants. Based on the discussion of the previous research results, several conclusions can be drawn that: The Basic Food Program is government assistance aimed at helping people face difficulties in meeting their daily needs for people in the poor category. One of them is the basic food assistance program, which is a social food assistance program held by the City Government in accordance with instructions from the Minister of Home Affairs to overcome the impact on society. The target of this program is of course the less fortunate. The Communication Dimension or Target Accuracy of the Basic Food Assistance Receiving Program is measured from the target group dimension by looking at the communication aspect of target accuracy and the socialization process which can be concluded that the target accuracy process has been determined, namely that the poor are included in the DTKS. Improving the Quality of Human Resources (HR) is a Program for Receiving Basic Food Assistance which means that improving the quality of HR/employee training is quite clear. Basic food needs and the budget source comes from the Social Service/APBN. The budget is very sufficient for the residents of Gentawangi Village who receive basic food assistance from the Social Service. Implementation Attitude is an activity which certainly cannot be separated from the implementation attitude, whether in the form of support or otherwise. One of the implementation attitudes is support from the government as well as support from the village and community.

Keywords; *Implementation, Basic Food, Assistance Program*

A. PENDAHULUAN

Indonesia adalah suatu Negara yang berkembang di dunia, dalam hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor Indonesia juga masih kurang dalam sumber daya

manusia, salah satunya masyarakat. Beberapa hal yang di hadapi oleh masyarakat Indonesia masih juga belum baik dalam segi sosial maupun politik, yaitu kemiskinan itu sendiri merupakan masalah yang sudah lama dihadapi di Indonesia pertama pada tahun 2014-2015, terjadi kemiskinan disebabkan oleh beberapa faktor yaitu tingkat pendidikan masih kurang, produktivitas lapangan kerja sedikit, tingkat upah sangat kurang, distribusi pendapatan yang timpang, kesempatan peluang yang belum stabil. Pada tahun 2020 Negara Indonesia terkena musibah yang sangat berbahaya yaitu Covid-19 menyebabkan bertambahnya penduduk miskin. Kenaikan harga barang masyarakat akan berdampak secara berantai pada kehidupan sehari-hari sehingga dapat berpengaruh pada penurunan daya beli sebagian banyak masyarakat khususnya rumah tangga dengan pendapatan rendah atau rumah tangga miskin.

Melihat dari tingginya angka kemiskinan di Indonesia program maupun kebijakan pun dihasilkan oleh pemerintah demi mengentaskan kemiskinan. Salah satu diantaranya adalah program sembako yang merupakan program lanjutan dari Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Pada tahun 2023, program BPNT dikembangkan menjadi program sembako. Transformasi menjadi program sembako dilakukan dalam rangka mewujudkan penguatan perlindungan sosial pangan program bantuan sembako kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Penerimaan Bantuan Sembako dijelaskan bahwa yang berhak menerima bantuan tersebut yaitu Keluarga Penerima Manfaat atau Keluarga miskin saja. Sedangkan dalam Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2022 Tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupten Bnyumas. Seperti kasus di Desa Gentawangi, Kecamatan Jatilawang membenarkan banyaknya Keluarga Sejahtera yang masih mendapatkan bantuan sembako. Sehingga dengan hal tersebut peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut bagaimana pratik pendistribusian dan bagaimana administrasi pengaturan bagi seleksi kriteria penerima bantuan sembako karena dikhawatirkan akan terjadinya ketidak merataan dan ketidakadilan.

Untuk mengatasi masalah kemiskinan tersebut, maka pemerintah menggulirkan berbagai kebijakan yaitu salah satunya adalah Program Bantuan Sembako yang merupakan transformasi dari Beras untuk Keluarga Sejahtera (Rastra). Dari data yang didapatkan jumlah penerima sembako di Desa Gentawangi adalah 798 orang, yang peneliti gunakan untuk penelitian hanya 9 orang penerima sembako. Dan

penerimaan bantuan sembako dilakukan selama satu bulan sekali, tiap-tiap orang mendapatkan 10kg/karung (Bulog).

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek/objek penelitian (Nawawi,2019:63). Metode penelitian deskriptif-kualitatif difokuskan pada permasalahan atas dasar fakta yang dilakukan dengan cara pengamatan/observasi, wawancara, dan mempelajari dokumen-dokumen. Teknik yang digunakan pada penelitian ini yaitu teknik purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel yang mendasarkan ciri-ciri tertentu untuk tujuan tertentu pula. Data yang diperlukan akan dikumpulkan melalui tiga kombinasi tiga teknik pengumpulan data, yaitu ; (1) Wawancara, (2) Observasi, (3) Dokumentasi. Penelitian ini dianalisis dengan metode analisis Miles and Huberman (1984) dalam (Sugiyono 2012:246), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Program Penerimaan Bantuan Sembako di Desa Gentawangi Kecamatan Jatilawang Kabupaten Bnyumas akan ditinjau dari aspek-aspek kebijakan yang diinginkan, kelompok sasaran, organisasi pelaksana dan faktor lingkungan.

1. Dimensi Komunikasi

Dalam penelitian ini beberapa pendapat penulis peroleh yang antara lain berdasarkan kriteria pendukung kelompok sasaran melalui beberapa aspek seperti ketepatan sasaran dan proses sosialisasi yang didapat. Proses penetapan sasaran sudah ditentukan, yaitu masyarakat miskin yang masuk dalam DTKS dan memiliki minimal 1 kategori dalam sebuah keluarga (ibu hamil, warga yang sudah tergolong usianya sudah tidak mampu untuk bekerja dan ekonominya sangat sulit dan lain sebagainya) masyarakat yang menerima bantuan sembako sangat puas dan terpenuhi sedikit untuk kehidupan sehari-harinya. Hal ini sesuai dengan teori yang di dapat.. Berbagai proses sosialisasi yang dapat dirasakan oleh masyarakat untuk proses sosialisasinya sudah cukup berjalan dengan baik dan berdampak positif untuk masyarakat karena sangat membantu dan untuk mudah dipahami. Hal ini sesuai

dengan model implementasi kebijakan menurut George C. Edward III (dalam Subarsono, 2011: 90-92) Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.

2. Sumber daya

Sebuah program tentu membutuhkan pelaksana, baik itu pelatihan-pelatihan peningkatan kualitas SDM/pegawai di desa tersebut agar tercapai apa yang menjadi tujuan untuk program penerimaan bantuan sembako tersebut, tentu dilaksanakan oleh pegawai-pegawai desa adanya pelatihan agar jelas dalam melakukan program penerimaan bantuan sembako dan sumber anggarannya sudah ada untuk pedoman pelaksanaannya. Program Penerimaan Bantuan Sembako bahwa untuk peningkatan pelatihan-pelatihan kualitas SDM/pegawai sudah cukup jelas dan sudah memuaskan untuk pelatihannya di Desa Gentawangi dan sangat mudah untuk dipahami oleh para pegawai yang terkait dalam program penerimaan bantuan sembako dan untuk sumber anggarannya berasal dari Dinsos/APBN. Untuk anggarannya sudah sangat mencukupi untuk warga Desa Gentawangi yang mendapatkan bantuan sembako dari Dinsos. Dan untuk hasilnya semakin baik dan efektif hal ini di dukung dari teori yang di dapat.

Hal ini sesuai dengan pendapat George C. Edward III (dalam Subarsono, 2011: 90-92) Sumber Daya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial.

3. Disposisi atau Sikap

Salah satu faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan adalah sikap implementor. Jika implementor setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati dan sangat mendukung. Untuk suatu kegiatan tentu tidak lepas dari sikap pelaksanaan baik yang berupa dukungan maupun

lainnya. Salah satu sikap pelaksanaan tersebut adalah dukungan dari pemerintah juga bagaimana bentuk dukungan dari desa dan masyarakat diberikan

Program Penerimaan Bantuan Sembako tentu membutuhkan dukungan dari Lembaga khususnya yaitu lembaga pemerintah dalam pelaksanaan mulai dari penepatan sasaran hingga penyaluran diberikan. Dalam dimensi sikap pelaksanaan dukungan lembaga pemerintah daerah sangat mendukung sekali adanya program penerimaan bantuan sembako. Bentuk pengawasan dan pengendalian telah diupayakan dan baik karena untuk pengawasannya dilakukan setiap sebulan sekali pada saat penerimaan bantuan sembako dan diawasi oleh pegawai-pegawai desa. Program Penerimaan Bantuan Sembako dari dukungan lembaga pemerintah menyimpulkan bahwa pemerintah daerah sangat mendukung adanya program sembako dan untuk bentuk sikap pengawasan dan pengendaliannya sudah cukup baik karena dilakukan pada saat pembagian bantuan sembako di desa gentawangi dan itupun dalam bentuk nyata dan tepat sasaran. Dan untuk hasilnya semakin baik dan efektif hal ini di dukung dari teori yang di dapat.

Hal ini sesuai dengan pendapat George C. Edward III (dalam Subarsono, 2011: 90-92) Disposisi, adalah waktu dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki sikap yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti dukungan dari pemerintah.

4. Struktur Birokrasi

Struktur Organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah SOP (Standard Operating Procedure). Suatu kegiatan tentu tidak lepas dari standar operasional prosedur baik yang berupa aturan dari pemerintah daerah. Salah satu aturannya tersebut adalah aturan dari pemerintah dan untuk itu terdapat undangan dari kantor pos atau undangan resmi untuk desa agar dibagikan kepada masyarakat yang menerima bantuan sembako dan untuk hasil adanya program sembako juga sangat membantu masyarakat. Dalam dimensi struktur birokrasi, ruang lingkup SOP untuk standar operasional dan prosedurnya sudah cukup baik karena mengikuti aturan yang berlaku yaitu aturan dari pemerintahan daerah. dan untuk hasil

adanya program penerimaan bantuan sembako juga sangat membantu sekali karena masyarakat yang masih tergolong kriteria sangat dibantu.

Hal ini sesuai dengan pendapat George C. Edward III (dalam Subarsono, 2011: 90-92) Struktur Birokrasi, Struktur Organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari Struktur Organisasi adalah SOP (Standar Operasional Prosedur) dan fragmentasi. Struktur Organisasi yang terlalu Panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan beberapa hal yaitu :

1. Program sembako adalah bantuan pemerintah bertujuan untuk membantu masyarakat dalam menghadapi kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya bagi masyarakat yang kategori miskin. Salah satu adalah program bantuan sembako ini, yang merupakan program bantuan sosial pangan yang diadakan Pemerintah Kota sesuai dengan instruksi Menteri Dalam Negeri untuk mengatasi dampak pada masyarakat. Target dari program ini tentunya masyarakat bagi yang kurang mampu. Program ini dilakukan untuk dapat meringankan beban masyarakat Oleh karena itu pemerintah membuat program pembagian Sembako guna meringankan beban masyarakat. Program Sembako adalah pembangunan dari Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sebagai program perubahan bantuan pangan untuk memastikan program ini lebih tepat pada sasaran, jumlah, waktu, kualitas, administrasi.
2. Dimensi komunikasi atau ketepatan sasaran Program Penerimaan Bantuan Sembako di ukur dari dimensi kelompok sasaran dengan melihat aspek komunikasi ketepatan sasaran dan proses sosialisasi yang dapat di simpulkan bahwa proses penepatan sasaran sudah ditentukan, yaitu masyarakat miskin masuk dalam DTKS dan memiliki minimal 1 kategori dalam sebuah keluarga (warga yang usianya sudah tidak mampu untuk bekerja dan ekonominya sangat sulit dan lain sebagainya) tentu masyarakat

yang menerima bantuan sembako sangat puas dan terpenuhi sedikit untuk kehidupan sehari-harinya.

3. Peningkatan Kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) adalah Program Penerimaan Bantuan Sembako bahwa untuk peningkatan pelatihan-pelatihan kualitas SDM/pegawai sudah cukup jelas dan sudah memuaskan untuk pelatihannya di Desa Gentawangi dan sangat mudah untuk dipahami oleh para pegawai yang terkait dalam program penerimaan bantuan sembako dan untuk sumber anggarannya berasal dari Dinsos/APBN. Untuk anggarannya sudah sangat mencukupi untuk warga Desa Gentawangi yang mendapatkan bantuan sembako dari Dinsos.
4. Standar operasional adalah suatu kegiatan tentu tidak lepas dari standar operasional prosedur baik yang berupa aturan dari pemerintah daerah. Salah satu aturannya tersebut adalah aturan dari pemerintah dan untuk itu terdapat undangan dari kantor pos atau undangan resmi untuk desa agar dibagikan kepada masyarakat yang menerima bantuan sembako dan untuk hasil adanya program sembako juga sangat membantu masyarakat.
5. Sikap Pelaksanaan adalah Suatu kegiatan yang tentu tidak lepas dari sikap pelaksanaannya baik yang berupa dukungan maupun lainnya. Salah satu sikap pelaksanaan tersebut adalah dukungan dari pemerintah juga bentuk dukungan dari desa dan masyarakat diberikan.

Berdasarkan hasil kesimpulan tersebut diatas, maka implikasi yang dibuat dari hasil penelitian tersebut oleh penulis ini adalah :

1. Ketepatan Sasaran yang dirasakan sudah cukup baik, namun perlu lebih ditingkatkan lagi antara lain sasaran lebih spesifik lagi.
2. Bahwa dalam pelaksanaan Program Penerimaan Bantuan Sembako sudah dilaksanakan sesuai dengan aturan dari peraturan daerah yang berlaku, namun perlu ditingkatkan lagi antara lain dengan mempertegas sikap pelaksanaannya dan lebih disederhanakan agar lebih mudah dipahami oleh tenaga pendamping maupun masyarakat.

REFERENSI

Anggara, S. (2012). Ilmu Administrasi Negara. Bandung: CV Pustaka Setia.

- Darmi, T., & Mujtahid M.M. (2019). Peningkatan Kapasitas Kebijakan Dana Desa Dalam Mengentaskan Kemiskinan. *Journal of Indonesia Public Administration and Governance Studies (JIPAGS)*. Vol 1. Pp. 547-566.
- De'I Intania: Nomor: 800/27/01.3/2022 *Koordinasi Bantuan Sosial Pangan Program Sembako* Kabupaten Sragen Tahun 2022 dan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial.
- Dela Yani, (2022): *Implementasi Program Sembako* (Vol.2 Nomor 13 tahun 2021) Hidayati Nasrah, Irdayanti: *Implementasi Program Jaring*. Jurnal EL-Riyasah, Volume 11 Nomor 2 Tahun 2020.
- Felini O, Toporundeng, Wilson Bogar: *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)* Vol. 6, No. 1 Januari 2022 e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN : 2598-9944.
- Handyaningrat, Soewarno. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta : Gunung Agung. 1995.
- Handy Polarisma Hasibuan: *Implementasi Program Sembako*. Volume 4 Nomor 12 Tahun 2022.
- Hardiyansyah. *Manajemen Pelayanan dan Pengembangan Organisasi Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hatimatul Husna, Erma Eriyani: *Jurnal Administrasi Publik dan Pembangunan* <https://ppjp.ulm.ac.id/journals/index.php/jpp> ISSN: 2775-0590 (online) ISSN: 2665-3856 Vol.3 No. 1 2.
- Ikma, Eny Rochaida: Volume. 19 Issue 3 (2023) Pages 632-639 *INOVASI: Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Manajemen* ISSN: 0216-7786 (Print) 2528-1097 (online).
- Kuni Nabila: *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi, dan Ilmu Sosial* 303ISSN 1907-9990 | E-ISSN 2548-7175 | Volume 15 Nomor 2 (2021).
- Mulyadi, 2015, *Implementasi Organisasi*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.
- Nainggolan, Agnes Cellyana, Titi Stiawati, and Juliannes Cadith. "*Implementasi Program Sembako*." *Jurnal Governansi* 8.1 (2022) : 39-48.
- Nurdin Usman, 2002, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Bandung, CV Sinar. Baru.
- Nurkhaini, S., Nurman, S., Hasrul, H., & Indrawadi, J. (2023). *Implementasi Program Sembako di desa*. (*Journal of Education, Cultural and Politics*, 3(1),82-88.
- Pasolong, Harbani. *Teori Administrasi Publik*. Bandung : Alfa Beta. 2014.
- Sianturi, R.R. Batubara, B.M. & Angelia, N. (2021). *Implementasi Program Sembako Pada Masa Pandemi Covid-19 di Tingkat Kelurahan* Strukturasi: *Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 3(2) 2021: 185-191.

Silalahi, Ulbert. *Studi Tentang Ilmu Administrasi*. Bandung : Sinar Baru Algesindo. 2013.

Subarsono, A.G. (2013). *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Subianto, A. (2020). *Kebijakan Publik: Tinjauan Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi*. In *Brilliant*.

Tim Pengendali *Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai*, (2020). *Pedoman Umum Program Sembako 2020*. Jakarta.

Turang, E. G., Tulusan, F., & Palar, N. (2022). *Implementasi Pelayanan Darurat Call Center Manado Siaga 112 (Studi di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Manado)*. *Jurnal Administrasi Publik*, 8(116).

<https://www.jogloabang.com/sosial/permensos-5-2021-program-sembako>

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Menteri Sosial RI No: 20 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Penerimaan Program Sembako

Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2022 Tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas